

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

2.1.1.1 Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengumpulkan dan mengelola sumber daya uang dari dalam wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan, mendukung berjalannya pemerintahan, memberikan layanan kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan wilayah secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat (Amin Insani et al., 2023:113). Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD (Marselina et al., 2023:2).

Kinerja keuangan antara lain mencakup kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan selama periode akuntansi, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan investasi (Halim & Kusufi, 2014). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola

sumber daya keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berkelanjutan. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal, mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui pengukuran rasio keuangan yang bersumber dari laporan pertanggungjawaban APBD.

2.1.1.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Menurut Halim & Kusufi (2014) mengungkapkan bahwa salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah yang lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut:

1. DPRD sebagai wakil dari pemeluk daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan, dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.1.1.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Panduan untuk mengelola, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah, serta prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), ukuran kinerja diidentifikasi sebagai unsur tambahan yang perlu dikembangkan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan dalam kerangka anggaran kinerja.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi dalam bidang keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan petanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Menurut Halim & Kusufi (2014) Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menjadi parameter evaluasi dalam rangka:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Beberapa poin dalam peraturan ini melibatkan penetapan indikator dan target kinerja, pelaporan berkala, evaluasi kinerja program dan kegiatan, serta penyusunan laporan evaluasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Regulasi ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2.1.1.4 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Pranita et al. (2024:137) Menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang dianggap sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lain yang sah.

2. Ukuran Pemerintah

Ukuran Pemerintah adalah nilai nominal yang mencerminkan sesuatu. Besarnya pemerintah daerah mencerminkan seberapa besar atau kecil suatu daerah. Besarnya pemerintahan daerah dapat diukur dari total aset, jumlah penduduk, dan total pendapatan.

3. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang dipindahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan khusus.

4. Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang disadari dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dilakukan secara aktif oleh peserta didik, bertujuan untuk meningkatkan potensidiri dan mengembangkan nilai-nilai spiritual, pengendalian diri, kepribadian, moralitas, kecerdasan, serta keterampilan yang memiliki manfaat bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara.

5. Opini Audit

Laporan auditor adalah pernyataan profesional yang dibuat oleh auditor terdaftar untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan suatu entitas sudah teratur. Dalam laporan tersebut, auditor memberikan pendapatnya mengenai keteraturan laporan keuangan, termasuk pertimbangan mengenai materialitas, kondisi keuangan, dan alur kas.

2.1.2 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan entitas pemerintah daerah. Penyampaian laporan keuangan merupakan tanggung jawab tertulis terhadap pencapaian kinerja keuangan. Menurut Mahmudi (2019:140) secara umum, tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

- 1) Memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
- 2) Menjadi alat akuntabilitas publik.
- 3) Menyediakan data yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan Adalah dokumen yang terstruktur yang merinci posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk mengungkap nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan juga di manfaatkan untuk menilai kondisi keuangan dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan (Halim & Kusufi, 2014).

2.1.3 Analisis Rasio Keuangan

Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Namun, untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis efektif, efisien, dan akuntabel,

analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim & Kusufi, 2014).

2.1.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1.1 Definisi Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan (Mahmudi, 2019:134).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan bertanggungjawab atas keuangan mereka sendiri, serta melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara mandiri, sejalan dengan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fisik) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim & Kusufi, 2014).

Sedangkan menurut Kawatu (2019:99) Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

2.1.3.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2017:89) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan suatu daerah antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto.
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan Lembaga Dinas Pendapatan Daerah.

2.1.3.1.3 Perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019:140) rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendaptan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Sedangkan menurut DJPK (2019) Perbandingan PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi, yang berarti bahwa belanja daerahnya semakin banyak

didanai dari pendapatan asli daerahnya. Berikut merupakan rumus kemandirian daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, kita bisa tahu bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar daerah mengandalkan sumber dana dari luar. Semakin besar angka rasio ini, artinya pemerintah daerah semakin tidak bergantung pada bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio ini, berarti pemerintah daerah semakin bergantung pada dana dari luar.

2.1.3.1.4 Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Besarnya tingkat atau rasio kemandirian keuangan di suatu daerah memengaruhi cara hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan dan mengelola keuangan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan rasio kemandirian keuangan beserta pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

Tabel 2. 1

Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25 – 50%	Konsultif
Sedang	50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	75 – 100%	Delegatif

Sumber: Dilliana & Herdi (2022:26)

Dalam kemandirian keuangan daerah terdapat beberapa pola yang menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa pola tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.1.3.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.2.1 Definisi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim & Kusufi (2014) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

2.1.3.2.2 Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2019:141) rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektifitas Keuangan Daerah	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

2.1.3.3 Efisiensi Keuangan Daerah

2.1.3.3.1 Definisi Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu)

atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi pemerintah daerah semakin baik. Untuk pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun berhasil itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim & Kusufi, 2014).

2.1.3.3.2 Perhitungan Rasio Keuangan Daerah

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin rendah nilai rasio efisiensi menunjukkan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut merupakan kriteria rasio efektivitas keuangan daerah:

Tabel 2. 3

Kriteria Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90 – 100%	Kurang Efisien
80 – 90%	Cukup Efisien
60 – 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

2.1.3.4 Keserasian

2.1.3.4.1 Definisi Keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui kesimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu mengatur proporsi belanja secara seimbang antara belanja operasi dan belanja modal (Mahmudi, 2019:160). Analisis Keserasian belanja antara lain berupa:

1. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja.
2. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja.
3. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja.
4. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja dipilih karena belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan jangka panjang dan peningkatan pelayanan publik. Rasio ini membantu mengetahui prioritas kebijakan anggaran daerah dan mudah dibandingkan antar daerah serta antar periode karena datanya tersedia dalam laporan realisasi APBD.

2.1.3.4.2 Perhitungan Keserasian

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini dapat mengetahui porsi belanja yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi

yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang (Kawatu, 2019:118). Selain itu, belanja modal tidak bersifat rutin. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

Rasio keserasian merupakan perbandingan antara belanja Modal dengan belanja total APBD, satuan ukurnya dinyatakan dalam persentase (%):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2.1.3.5 Pertumbuhan Pendapatan

2.1.3.5.1 Definisi Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus mencari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik (Mahmudi, 2019:137).

2.1.3.5.2 Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Halim & Kusufi (2014) Mengungkapkan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen

sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang mendapatkan perhatian. Cara mengukur tingkat pertumbuhan adalah dengan membandingkan selisih antara pendapatan periode tertentu dengan periode sebelumnya dengan pendapatan tahun sebelumnya. Satuan ukur dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } n - \text{Pendapatan Tahun } (n - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang membutuhkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal, serta semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya dianggap positif. Artinya, daerah tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi semakin tinggi, sementara Belanja Modal semakin rendah, maka pertumbuhannya dianggap negatif. Artinya, daerah tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

2.1.4 Kajian Empiris

Adapun kajian empiris yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ratu et al. (2023). Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan Di Sulawesi Utara. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan yang ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Sedangkan ditinjau dari rasio ketergantungan dan rasio efektivitas tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

2. Puspita & Pangastuti (2022). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan pendapatan di tahun 2020 dibanding 2019, tetapi terdapat penghematan atas belanja yang dilakukan di tahun 2020. Dominasi peran pemerintah pusat secara finansial masih terlihat baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Tingkat efektivitas di tahun 2020 dapat dikatakan naik dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan pendapatan, tetapi tingkat efisiensi di tahun 2019 dan 2020 masih dapat dikatakan efisien. Belanja di tahun 2019 dan 2020 masih banyak digunakan untuk belanja operasi, walaupun terjadi kenaikan yang cukup pesat pada belanja tak terduga. Selain itu, belanja operasi, belanja modal dan belanja terduga masih dapat dikatakan ekonomis untuk tahun 2019 dan 2020.
3. Soraida, (2022). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Selama Pandemi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkot Banjarmasin keuangan tahun 2018 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,29% termasuk dalam kriteria efektif, sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 105,12% termasuk dalam kriteria sangat efektif sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 73,98 % termasuk dalam kriteria kurang efektif dan untuk tahun 2021 realisasi efektivitas PAD sebesar 101,34%, artinya termasuk dalam kriteria sangat efektif. Rasio kemandirian pemerintah kota Banjarmasin tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 17,60% artinya kemandirian keuangan daerah masuk dalam kriteria kurang mandiri, dan pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar

31,68% artinya kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria cukup mandiri, sedangkan pada tahun 2020 rasionya mandiri. kemandirian sebesar 26,57% artinya kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria sedang dan pada tahun 2021 rasio kemandirian berada pada angka 30,40% artinya kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria cukup mandiri. Pemerintah kota Banjarmasin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga juga dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal keuangan.

4. Anwar et al. (2024) Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak terdapat perbedaan kinerja sebelum dan setelah refocusing dan realokasi anggaran pada pemerintah kota Gorontalo serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang artinya bahwa pada saat pandemi pemerintah kota Gorontalo terus berupaya menjaga kinerja keuangan daerah.
5. Sulistianingtyas & Suhardjanto (2023). Mengenai Analisis Kompratif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Recofusing Anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerinrah Daerah Kabupaten/Kota di provinis Jawa Timur.
6. Febrianti et al. (2024). Mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pagu Anggaran Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata – rata efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi *Covid-19* sebesar 106% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan nilai rata – rata efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi *Covid-19* sebesar 99% dengan kriteria kurang efisien.

7. Zulkarnain et al. (2020). Mengenai Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kabupaten dan kota di provinsi aceh selama tahun 2014-2018 dilihat dari rasio kemandirian dan rasio efektivitas.
8. Harahap, (2020). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *The results of this study indicate that the financial performance of the Central Tapanuli Tengah Regional Government is generally said to be quite good, although the degree ratio is still relatively low, financial dependence on the Central / Provincial Government is still very high and the receipt of Regional Original Revenue does not reach the budgeted target. Central Tapanuli Regency Government to update the data of regional taxpayers, explore the potential of new sources of local revenue, and increase the socialization of tax benefits and user fees.*
9. Venni et al. (2023). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan, tax ratio, solvabilitas jangka pendek tidak mengalami perbedaan yang

signifikan pada sebelum dan saat pandemi *Covid-19* sedangkan rasio belanja modal dan fleksibilitas keuangan mengalami perbedaan pada sebelum dan saat pandemi *Covid-19* yang dipengaruhi karena adanya kebijakan pembatasan sosial, kebijakan refocusing dan realokasi APBD tahun 2020.

10. Vebiani et al. (2022). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada saat Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19* dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Namun, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada saat *Covid-19* mengalami perbaikan dilihat dari rasio kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sementara kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan.
11. Sayadi et al. (2023). Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19*. *The results of the analysis show that Aceh province with the best financial performance during the pandemic period is based on the regional financial dependence ratio with a ratio of 28.49%. The highest regional financial dependency ratio is in the Riau Islands province with a ratio of 65.39%. Further research is expected to expand and expand the research sample and use other indicators in analyzing the financial performance of local governments.*
12. Syahara & Aufa (2022). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19*. *Based on*

the data analysis carried out, it was concluded that there were significant differences in financial independence, financial flexibility, operational solvency and no significant differences in short-term solvency, long-term solvency, solvency services of the East Java Provincial Government before and during the Covid-19 pandemic.

13. Rheswari & Akbar (2022). Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi *Covid-19* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD dengan rata-rata 104% sudah tergolong sangat efektif, Rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata 251% sudah tergolong dalam pola hubungan partisipatif, Rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata 32% dan sudah masuk dalam kategori cukup baik. Rasio keserasian belanja rata rata belanja operasi 75 % dan belanja modal 11%. Rasio efisiensi keuangan rata rata 84% sudah cukup efisien.
14. Arfath & Priyono (2023). Mengenai Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta Sebelum dan Pada Saat Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan perbandingan yang signifikan pada rasio efektivitas dan pada rasio aktivitas belanja modal sedangkan pada rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi *Covid-19* pada kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta.
15. Suratno & Isnawati (2025). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-

2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi PAD tergolong baik, sedangkan rasio kemandirian masih rendah dengan pola instruktif. Rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan selama periode observasi. Model *Random Effect* dipilih sebagai model terbaik, dan keempat rasio terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan.

16. F. Rahmawati & Kiswara (2022). Mengenai Dampak *Covid-19* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Based on the results of the study, this study states that the ratio of financial performance to the effectiveness of PAD, the ratio of regional tax contributions to PAD, and the ratio of capital expenditures have significant differences before and during the Covid-19 pandemic. The ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of financial independence, and the ratio of regional retribution contributions did not experience significant differences before and during Covid-19.*
17. Yusrina et al., (2023). Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini menunjukkan Rasio desntralisasi, kemandirian keunagan daerah dan efektivitas PAD memberikan kontribusi yang baik sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan masih dinilai kurang baik.

18. Restiana et al. (2024). Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Jambi secara rata-rata lebih tinggi dibanding dengan kabupaten tebo, dilihat dari Rasio efektivitas menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tebo lebih efektif dibanding dengan Kota Jambi, dilihat dari Rasio Efisiensi menunjukkan persentase tingkat efisiensi Kabupaten Tebo lebih kecil dibandingkan dengan Kota Jambi. Untuk Kabupaten Tebo dan Kota Jambi dikategorikan kurang efisien dalam mengelola keuangan, dilihat dari Rasio keserasian menunjukkan kedua daerah lebih mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dibanding dengan belanja modal, dan dilihat dari Rasio pertumbuhan bahwa pertumbuhan PAD kota Jambi lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten tebo.
19. Rachmadani et al. (2022). Mengenai *Covid-19 Budget Refocusing: Evidence from Indonesia. The patient recovery rate economic impact significantly influence the adjustment of local government budgets in Indonesia due to the covid-19 pandemic.*
20. Ilyas et al. (2023). Mengenai *Analysis of Local Government Financial Performance Based on the Method Value for Money. The results indicate that the economic and efficiency ratios have met the Value for Money standard so that the budget can be more targeted and enjoyed by the community, while the*

effectiveness ratio has not met the Value for Money standard but there is still a need for continuous improvement in public services so that the effectiveness of government performance is achieved even better in the coming year. But the performance of Makassar City Government as a whole is good.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ratu et al. (2023) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan Non Kepulauan Di Sulawesi Utara periode 2014-2018.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio aktivitas.	Tempat dan waktu penelitian, serta menggunakan metode analisis deskriptif dan uji beda rata-rata dengan metode independent Sampel t-test.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan ditinjau dari rasio ketergantungan dan rasio efektivitas tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.	Jurnal EMBA Vol. 11 No. 3 September 2023, Hal. 1428-1438 ISSN: 2303-1174
2	Puspita & pangastuti (2022) Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian,	Tempat dan waktu penelitian serta terdapat rasio ekonomi.	Tingkat efektivitas di tahun 2020 dapat dikatakan naik dibandingkan	Among Makarti Vol. 15 No. 1 – Juni 2022 ISSN:

	<i>Covid-19</i> Periode 2010-2020	rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.			tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan pendapatan, tetapi tingkat efisiensi di tahun 2019 dan 2020 masih dapat dikatakan efisien. Belanja di tahun 2019 dan 2020 masih banyak digunakan untuk belanja operasi, walaupun terjadi kenaikan yang cukup pesat pada belanja tak terduga. Selain itu, belanja operasi, belanja modal dan belanja terduga masih dapat dikatakan ekonomis untuk tahun 2019 dan 2020.	1979-7400 E-ISSN: 2774-5163
3	Soraida (2022) Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Selama Pandemi <i>Covid-19</i> periode 2018-2021	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD.	Tempat waktu penelitian.	dan	efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018,2019 dan 2021 berada di dalam kriteria efektif dan sangat efektif sedangkan untuk tahun 2020 kurang efektif dan analisis rasio kemandirian menunjukkan berfluktuasi.	JURNAL JEKMA Vol 1 No. 2 Juni 2022 Halaman 78-82 ISSN: 2828-6928, E-ISSN: 2828-6898
4	Anwar et al. (2024) Pemerintah Kota Gorontalo Sebelum dan Setelah Pandemi <i>Covid-19</i>	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas.	Tempat waktu penelitian terdapat penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu belanja modal, serta	dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio belanja modal dan rasio	<i>Jambura Accounting Review</i> , Volume 5 No. 2, Agustus 2024. Hal. 228 – 241 E-ISSN:

	periode 2018-2021	PAD dan rasio pertumbuhan.	penggunaan metode analisis uji beda menggunakan uji paired sampel-t tets dan uji wilcoxon.	pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak terdapat perbedaan kinerja sebelum dan setelah pandemi <i>Covid-19</i>	2721-3617
5	Sulistianingtyas & Suhardjanto (2023) Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Refocusing Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa Timur) periode 2019-2020.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder dan menghitung rasio kemandirian Rasio efektivitas.	Tempat dan waktu penelitian, dan menggunakan metode analisis Paired-Sample t-test dan terdapat jenis rasio yang berbeda yaitu rasio derajat desentralisasi, serta rasio belanja operasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini didukung.	Seminar Nasional LPPM UMMAT Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram, 05 April 2023 ISSN 2964-6871 Volume 2 April 2023 pp. 1146-1152
6	Febrianti et al. (2024) Pemerintah Kota /Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Periode 2020 – 2021	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitian serta menghitung kinerja keuangan dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas.	Waktu penelitian serta menggunakan analisis data yaitu metode rasio perbandingan efektivitas dan metode rasio perbandingan efisiensi.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai rata – rata efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> sebesar 106% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan nilai rata-rata efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> sebesar 99% dengan kriteria kurang efisien.	JUSTIKA Jurnal Sistem Informasi Akuntansi ISSN (Print) 2798-446X VOL. 04 NO. 01 (2024) PP. 29~36
7	Zulkainain et al. (2020) Perbandingan Kinerja	Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Tempat dan waktu penelitian,	Hasil penelitian diketahui rasio kemandirian untuk kabupten	Akuntabel - pISSN: 0216-7743 - eISSN: 2528-1135 62

	Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Periode 2014-2018.	dengan data sekunder, dan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, serta penggunaan Metode analisis uji t independent sampel test.		dan kota di Provinsi Aceh secara keseluruhan belum mandiri atau masih sangat rendah. Kemudian rasio efektivitas untuk kabupaten dan kota di provinsi Aceh sudah efektif. Hasil uji beda untuk rasio kemandirian diperoleh nilai p value (sig 2-tailed) $> \alpha$ 5% atau 0,119 $>$ 0,05 dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan kemandirian antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018. Hasil uji beda untuk rasio efektivitas nilai p value (sig 2-tailed) $> \alpha$ 5% atau 0,675 $>$ 0,05 dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018.	
8	Harahap (2020) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas.	Tempat dan waktu penelitian serta jenis rasio yang berbeda yaitu rasio desentralisasi.	<i>The results of this study indicate that the financial performance of the Central Tapanuli Tengah Regional</i>	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> , 4(1), Maret 2020:

	periode 2016-2018.			Government is generally said to be quite good, although the degree ratio is still relatively low, financial dependence on the Central / Provincial Government is still very high and the receipt of Regional Original Revenue does not reach the budgeted target. Central Tapanuli Regency Government to update the data of regional taxpayers, explore the potential of new sources of local revenue, and increase the socialization of tax benefits and user fees.	34-38 ISSN: 2597-8829
9	Venni et al. (2023) Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Periode 2018-2021	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian.	Tempat dan waktu penelitian serta perhitungan kinerja keuangan dengan tax rasio, solvabilitas jangka pendek, rasio belanja modal dan fleksibilitas keuangan, serta penggunaan metode analisis uji paired simple t-test dan uji wilcoxon signed rank test.	Rasio kemandirian keuangan, tax ratio, solvabilitas jangka pendek tidak mengalami perbedaan signifikan sedangkan rasio belanja modal dan fleksibilitas keuangan mengalami perbedaan.	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> Volume 7, No 2 (2023), September, Halaman 1134-1144 ISSN: 2597-8829
10	Vebiani et al. (2022)	Menggunakan data sekunder dengan	Waktu penelitian serta jenis rasio yang	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat	<i>Fineteach: Journal of</i>

	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat) periode 2019-2020.	menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi.	berbeda yaitu rasio desentralisasi fisik dan menggunakan metode analisis uji paired sample t-test.	perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Namun, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada saat Covid-19 mengalami perbaikan dilihat dari rasio kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sementara kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan.	<i>finance, Entrepreneurship and Accounting Education Research</i> Vol. 1, No. 1 Agustus, 2022:113-126
11	Sayadi et al. (2023) Pemerintah Daerah pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera sebelum dan saat Pandemi Covid-19 periode 2019-2020.	Menggunakan data sekunder yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran.	Tempat dan waktu penelitian serta penggunaan rasio ketergantungan keuangan daerah.	Kinerja keuangan provinsi yang terletak di pualu sumatera memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Level ketergantungan meningkat saat pandemi Covid-19.	Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Volume 2 Nomor 23, 2023, Halaman .1-6 ISSN: 1412-629X I E-ISSN: 2579-3055

12	Syahara & Aufa (2023) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2020	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian.	Tempat, waktu penelitian dan perhitungan kinerja keuangan dengan fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, jangka panjang, jangka pendek dan layanan, serta penggunaan metode analisis uji beda menggunakan uji <i>paired sampel-t test</i> dan uji wilcoxon.	Terdapat perbedaan pada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional dan tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas jangka pendek, jangka panjang, layanan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi covid-19.	JCCA Volume 1, 2022, Halaman: 27-38 E-ISSN: 2830-5574, ISSN: 2830-0289
13	Rheswari & Akbar (2022) Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 periode 2018-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian dan Rasio efisiensi keuangan.	Tempat, waktu penelitian dan penggunaan rasio desentralisasi fisik serta tidak membandingkan signifikansi menggunakan uji beda.	Rasio kemandirian keuangan daerah sudah tergolong dalam pola hubungan, partisipasif, rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif, rasio derajat desentralisasi fisik sudah masuk dalam kategori cukup baik, rasio efisiensi keuangan sudah cukup efisien dan rasio keserasian belanja rata rata belanja operasi 75% dan belanja modal 11%.	AL-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah, Volume 4, Nomor 6, 2022, Halaman: 1897-1913 ISSN: 2656-2871 E-ISSN: 2656-4351
14	Arfath & Priyono (2023) Pemprov DKI Jakarta Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19 periode 2010-2020.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio efisiensi,	Tempat, dan waktu penelitian	Terdapat perbedaan perbandingan yang signifikan pada rasio efektivitas dan rasio aktivitas belanja modal	Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 7, Nomor 1, 2023 Halaman: 440-451

		rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan serta menggunakan metode analisis uji beda.		sedangkan pada rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> pada kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta.	E-ISSN: 2685-5607
15	Suratno & Isnowati (2025) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan PAD.	Tempat, waktu penelitian dan menggunakan metode analisis rasio keuangan dan regresi data panel, meliputi Uji <i>Chow</i> , Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, serta regresi linear berganda yang dilengkapi dengan Uji <i>t</i> , Uji <i>F</i> , dan koefisien determinasi (R^2). Serta menggunakan teknik purposive sampling.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi PAD tergolong baik, sedangkan rasio kemandirian masih rendah dengan pola instruktif. Rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan selama periode observasi. Model Random Effect dipilih sebagai model terbaik, dan keempat rasio terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara parsial maupun simultan.	JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA Volume 9, Nomor 3, 2025 ISSN: 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
16	Rahmawati & Kiswara (2022) 34 Pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019-2020.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, dan rasio efektivitas.	Tempat, waktu penelitian dan penggunaan rasio desentralisasi fiskal, rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi Daerah terhadap PAD,	Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan terhadap efektivitas PAD, rasio kontribusi	Diponegoro <i>Jurnal Of Accounting</i> Volume 11, Nomor 2, 2022 Halaman: 1-8 ISSN: 2337-3806

			dan rasio belanja modal dan menggunakan metode analisis uji beda menggunakan uji <i>paired sampel-t test</i> .	pajak daerah terhadap PAD, dan rasio belanja modal memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan selama pandemi <i>Covid-19</i> . Rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, dan rasio kontribusi retribusi daerah tidak mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dan selama <i>Covid-19</i> .	
17	Hafyani et al. (2022) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi <i>Covid-19</i> periode 2019-2020	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.	Tempat, waktu penelitian dan terdapat beberapa penggunaan jenis rasio berbeda yaitu rasio desentralisasi fisik.	Rasio desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD memberikan kontribusi yang baik sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan masih dinilai kurang baik.	Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Volume 2, Nomor 3 September 2023, Halaman: 112-124 ISSN: 2963-8712
18	Restiana et al. (2024) Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo periode 2018-2022.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.	Tempat dan waktu penelitian.	Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Jambi secara rata-rata lebih tinggi dibanding dengan kabupaten tebo, dilihat dari Rasio efektivitas menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas	EBISMAN: eBisnis Manajemen Volume 2, Nomor 1, Meret 2024 ISSN: 3025-4388 E-ISSN: 3025-437X

				menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tebo lebih efektif dibanding dengan Kota Jambi, dilihat dari Rasio Efisiensi menunjukkan persentase tingkat efisiensi Kabupaten Tebo lebih kecil dibandingkan dengan Kota Jambi. Untuk Kabupaten Tebo dan Kota Jambi dikategorikan kurang efisien dalam mengelola keuangan, dilihat dari Rasio keserasian menunjukkan kedua daerah lebih mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dibanding dengan belanja modal, dan dilihat dari Rasio pertumbuhan bahwa pertumbuhan PAD kota Jambi lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten tebo.	
19	Rachmadani et al. (2022) Pemerintah Daerah se- Pulau Jawa pada tahun 2020.	Menggunakan data sekunder dan sampel jenuh.	Tempat dan waktu penelitian. Serta metode penelitian yang digunakan kualitatif dan alat statistik yang digunakan	<i>The patient recovery rate economic impact significantly influence the adjustment of local government budgets in Indonesia due to</i>	<i>Ilomata International Juornal of Tax & Accounting</i> Volume 3, Nomor 3, Halaman: 236-249 ISSN:

			yaitu analisis regresi linier.	<i>the covid-19 pandemic.</i>	2714-9838 E-ISSN: 2714-9846
20	Amril et al. (2023) Pemerintah Kota Makasar periode 2017-2021	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi PAD, dan rasio pertumbuhan.	Tempat, waktu penelitian dan terdapat penggunaan rasio aktivitas. Serta penggunaan metode <i>Value For Money</i> .	<i>The results show differences between before and during the Covid-19 pandemic in regional financial performance in terms of the ratio of local revenue effectiveness, capital expenditure activity ratio, and growth ratio. However, there were no differences in regional financial performance before and during the Covid-19 pandemic as measured by the regional financial independence ratio, efficiency ratio, and operational expenditure activity ratio.</i>	<i>Intenational Journal Of bussines and Sosial Sciense Research</i> Volume 4, Issue: 10 October 2023
Ilzam Muzaki (2025) 223403206					
Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2020-2024					

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2023;95), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Teori yang mendasari dalam penelitian

ini, yaitu *stewardship theory*. Teori ini menjelaskan situasi di mana manajemen tidak didorong oleh tujuan pribadi, tetapi lebih fokus pada tujuan utama yang ditetapkan untuk kepentingan organisasi (Davis et al., 1997). *Stewardship theory* menganggap bahwa kepuasan memiliki kaitan erat dengan kesuksesan sebuah organisasi. Kesuksesan organisasi mencerminkan upaya untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik itu pemilik maupun manajemen. Dengan memaksimalkan manfaat kelompok ini, akhirnya akan mendukung pencapaian kepuasan maksimal bagi setiap individu di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan *Stewardship theory*, pendekatan ini bisa diterapkan dalam penelitian akuntansi di organisasi sektor publik, seperti pemerintah dan organisasi nirlaba. Sejak awal berkembangnya akuntansi sektor publik, sistem ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara pihak yang mengelola (*stewards*) dan pihak yang memberi kepercayaan (*principals*). Teori ini terkait erat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien. Mereka berorientasi pada tujuan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan tanggung jawab, yang diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada hasil yang optimal.

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang heterogen antara pemerintah kota dan kabupaten, baik dari sisi luas wilayah, kepadatan penduduk,

maupun struktur ekonomi. Kota umumnya memiliki wilayah yang relatif sempit dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi pada sektor perdagangan, jasa, industri, dan properti. Kondisi ini membentuk basis penerimaan pajak daerah yang lebih beragam dan potensial, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, serta PBB-P2 perkotaan. Sebaliknya, kabupaten memiliki wilayah yang lebih luas dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah dan dominasi sektor primer, sehingga basis penerimaan pajak cenderung lebih terbatas dan bergantung pada sektor perdesaan serta dana transfer dari pemerintah pusat.

Perbedaan karakteristik wilayah dan basis penerimaan tersebut berimplikasi pada struktur pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pola pengalokasian belanja daerah. Kondisi ini diduga menimbulkan perbedaan kinerja keuangan antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai steward dalam mengelola keuangan publik, penelitian ini menggunakan lima indikator kinerja keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah

yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim & Kusufi, 2014). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendaptan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2019) .

Penelitian yang dilakukan oleh Alfansa & Wibowo (2022) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini serupa juga diungkap oleh Widiyanto & Isnowati (2023) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rasio kemandirian keuangan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Restiana et al. (2024) menunjukkan perbedaan di mana Rasio kemandirian keuangan Kota Jambi secara rata-rata lebih tinggi dibanding dengan kabupaten tebo Hal ini sejalan dengan penelitan.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim & Kusufi, 2014). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio

efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto & Isnowati (2023) menyatakan tidak terdapat perbedaan signifikan rasio efektivitas PAD pada kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfansa & Wibowo (2022) mengungkapkan terdapat perbedaan signifikan pada rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Restiana et al. (2024) menyatakan terdapat perbedaan bahwa Tingkat efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tebo lebih efektif dibanding dengan Kota Jambi.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi pemerintah daerah semakin baik. Untuk pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun berhasil itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim & Kusufi, 2014). Efisiensi

diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mahmudi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto & Isnowati (2023) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Restiana et al. (2024) mengungkapkan bahwa persentase tingkat efisiensi Kabupaten Tebo lebih kecil dibandingkan dengan Kota Jambi. Sedangkan penelitian oleh Sumitro (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dilihat dari rasio efisiensi pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur.

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal yaitu belanja operasi dan belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung makin kecil (Halim & Kusufi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto & Isnowati (2023) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari rasio keserasian. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Sumitro (2020) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur berdasarkan Rasio Aktivitas Belanja

Pembangunan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Restiana et al. (2024) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan jika dilihat dari rasio keserasian di mana kedua daerah lebih mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dibanding dengan belanja modal.

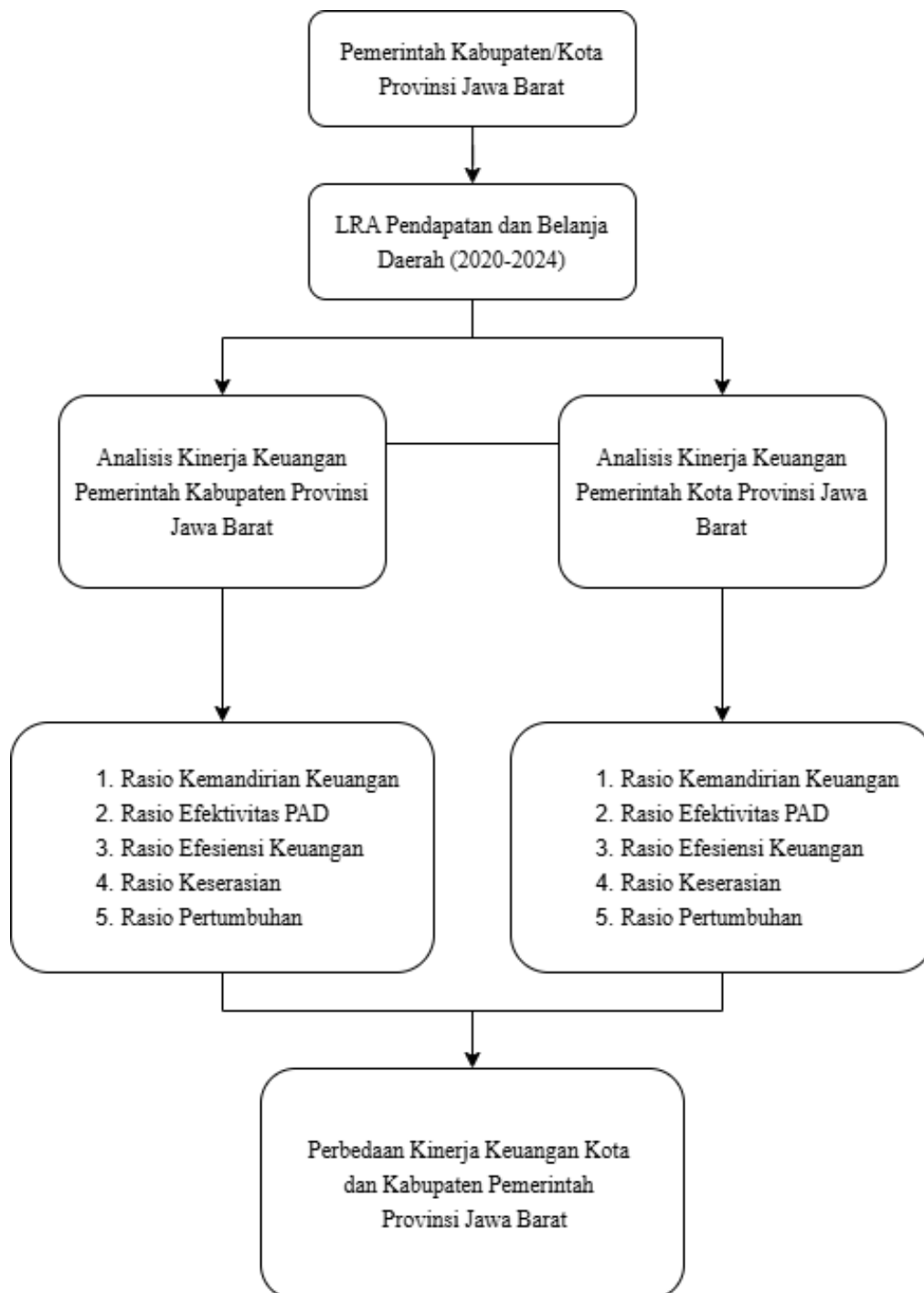
Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2019). Cara mengukur tingkat pertumbuhan adalah dengan membandingkan selisih antara pendapatan periode tertentu dengan periode sebelumnya dengan pendapatan tahun sebelumnya. Satuan ukur dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang membutuhkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal, serta semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya dianggap positif. Artinya, daerah tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi semakin tinggi, sementara Belanja Modal semakin rendah, maka pertumbuhannya dianggap negatif. Artinya, daerah tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Restiana et al. (2024) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dilihat dari Rasio pertumbuhan bahwa pertumbuhan PAD kota Jambi lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten tebo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumitro (2020) menyatakan bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Asli Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji kinerja keuangan daerah, studi-studi tersebut belum banyak memberikan gambaran komparatif antara kabupaten dan kota dalam satu provinsi secara komperhensif. Misalnya penelitian Irnawati et al. (2023) yang mengkaji kinerja keuangan dengan rasio kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan PAD hanya berfokus pada satu kota, sedangkan penelitian Kurniawati (2024) Mengkaji kinerja keuangan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi dan rasio efisiensi belanja daerah pada kabupaten tertentu tanpa membandingkan dengan kota. Penelitian Marsudi et al. (2024) memang meneliti Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tetapi belum melakukan analisis komparatif mendalam dengan mencakup data terbaru hingga 2024.

Berdasarkan tinjauan teori dari penelitian terdahulu, landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar perumusan hipotesis, berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimana, penulis hendak mencari perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah kota dan kabupaten. Maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2023:99) menyatakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban awal terhadap perumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan analisis rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Terdapat perbedaan tingkat kemandirian Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Terdapat perbedaan tingkat Efektivitas PAD Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
3. Terdapat perbedaan tingkat Efisiensi Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
4. Terdapat perbedaan tingkat Kesenjangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
5. Terdapat perbedaan tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.